

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legitimasi Politik Masyarakat Kota Palembang Terhadap Kemenangan Presiden Joko Widodo Pada Pilpres 2019

Penelitian ini membahas mengenai legitimasi masyarakat Kota Palembang terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dengan menggunakan landasan teori David Beetham. Seperti konsep kekuasaan dan kewenangan, legitimasi juga merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat ataukah tidak.

Apabila masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat maka kewenangan itu dikategorikan sebagai berlegitimasi. Maksudnya, legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Menurut David Beetham¹ untuk memelihara suatu legitimasi itu diperlukan 3 bagian yaitu :

⁴¹ David Beetham (1988), *The Legitimation Of Power*, Tottenham : Palgrave Houndmills. h.15.

1. Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan dengan aturan yang sudah dibuat.
2. Aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah.
3. Pihak yang diperintah harus menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa.

Menurut Beetham Agar kekuasaan sepenuhnya sah, maka, tiga syarat dalam membentuk legitimasi ini sangat diperlukan, kesesuaiannya dengan aturan yang ditetapkan, pembenaran aturan dengan mengacu pada keyakinan bersama, persetujuan tegas dari pihak yang diperintah, atau yang paling signifikan di antara mereka, untuk hubungan kekuasaan tertentu. Semua komponen tersebut berkontribusi pada legitimasi.²

Seperti halnya yang kita ketahui pada pelaksanaan pilpres ditahun 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tentu banyak pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat, lebih khususnya lagi kepada masyarakat Kota Palembang yang lebih dominan mendukung Prabowo dibanding mendukung Jokowi, seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh suara Prabowo dengan total suara 61,27 %, sedangkan suara Jokowi hanya mendapatkan total suara 38,73 %.³

Dukungan masyarakat Kota Palembang terhadap Prabowo bukan hanya di pilpres 2019 ini saja, melainkan masyarakat Kota Palembang telah mendukung Prabowo sejak pilpres di tahun 2014. Dalam hal ini kemenangan

⁴² *Ibid*, h.16

⁴³ www.Pilpres2019.Kpu.go.id. diakses tanggal 10 November 2019, pukul 02.00 wib.

presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dapat diterima oleh masyarakat Kota Palembang yang mayoritas pendukung Prabowo atau justru tidak diterima. Hal inilah yang akan dibahas pada bagian ini dengan menggunakan landasan teori legitimasi David Beetham yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berlandaskan teori tersebut apakah masyarakat Kota Palembang telah memenuhi syarat dalam melegitimasi kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 atau justru sebaliknya.

1. Kekuasaan Harus Berjalan Berdasarkan Aturan.

Pada suatu pemerintahan khususnya di Indonesia tentunya mempunyai aturan yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat itu sendiri, jika kekuasaan tidak mentaati aturan yang sudah dibuat sebelumnya maka masyarakat tidak menerima suatu kekuasaan yang melanggar aturan tersebut. Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika diperoleh dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, dan Kebalikan dari legitimasi sendiri aturan adalah sebagai kekuasaan yang tidak sah di mana ia berada disisi yang bertentangan dengan aturan (pengambilalihan, perampasan, kudeta), atau dipinggirkan dengan cara yang bertentangan atau melebihi aturan tersebut.⁴

Berdasarkan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 tentu kekuasaan berada dikendaliannya, dengan memegang suatu kekuasaan tentu banyak penilaian dari pihak yang diperintah yaitu masyarakat, salah satunya penilaian dari masyarakat yang berinisial ID

⁴⁴ *Ibid*, h.16

yang berdomisili dikecamatan Sematang Borang Kota Palembang, menurutnya bahwa dalam kepemimpinan Jokowi :

“Menurut saya dalam kepemimpinan Jokowi ini belum bisa dikatakan baik, karena lihat saja kemarin didalam berita ia ingin mengikuti cara presiden Amerika Serikat, jika membuat satu peraturan yang baru maka peraturan yang sudah ada harus di pangkas lebih dari satu peraturan, hal inilah yang membuat saya menilai dalam kepemimpinannya yang kurang baik karena mengapa harus memangkas peraturan yang lama lebih dari satu jika ingin membuat peraturan yang baru”⁵

Dari penjelasan ID diatas bahwa ia menyatakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan presiden Joko Widodo yang menurutnya yang serta merta ingin merubah peraturan yang sudah ada tanpa memikirkan apa yang akan terjadi kedepannya, dan juga pihak pemerintah tidak meminta persetujuan terlebih dahulu kepada masyarakat, gunanya peraturan itu untuk kepentingan bersama, seharusnya sebagai pemerintahan yang baik pemerintah meminta persetujuan terlebih dahulu kepada wakil rakyat jika ingin membuat aturan yang baru dan akan memangkas peraturan yang lama.

Seperti halnya pendapat dari masyarakat berinisial AN yang berdomisili di kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, menurutnya bahwa dalam pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo banyak sekali yang melanggar aturan dalam kepemimpinannya, ungkapnya :

“Menurut saya dalam kepemimpinan presiden Jokowi masih banyak yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan, contohnya pada saat Jokowi menjadi presiden, ia berani

⁴⁵ Masyarakat inisial ID, domisili kecamatan Sematang Borang. Wawancara tgl 09 November 2019.

memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur, hal itu jelas melanggar peraturan yang sudah ditetapkan”⁶

Dari penjelasan diatas bahwa AN merasa sangat tidak puas dengan cara kepemimpinan presiden Joko Widodo yang melanggar aturan perundang-undangan bahwa dana haji itu uang umat bukan uang negara, dana haji bisa dipakai jika untuk kepentingan kemasalahatan umat, jika dana haji itu dipakai dengan alasan untuk kemasalahatan umat ya boleh-boleh saja selagi untuk kenyamanan umat yang akan melaksanakan ibadah haji. Jika dana haji itu dipakai untuk kepentingan yang lain, maka jelas itu sangat melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Adapun pendapat lain dari masyarakat berinisial AR yang berdomisili di kecamatan Jakabaring Kota Palembang, ia berpendapat bahwa :

“Dalam asministratif seharusnya seorang presiden itu taat pada aturan yang berlaku agar bisa menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Sedangkan presiden terpilih sekarang dalam pencalonan dan pemilihan dia memilih tidak ada cuti seharipun dari kursinya sebagai presiden”⁷

Berdasarkan penjelasan masyarakat yang berinisial AR tersebut bahwa untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan yang taat pada aturan yang sudah ditetapkan maka presiden seharusnya mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Pada masa pencalonan atau dalam proses pemilihan presiden seharusnya seorang presiden harus mengambil cuti

⁴⁶ Masyarakat inisial AN , domisili kecamatan Ilir Barat II. Wawancara tgl 09 November 2019.

⁴⁷ Masyarakat inisial AR, domisili kecamatan Jakabaring. Wawancara tgl 09 November 2019.

dimasa pencalonan tersebut, tetapi yang seperti kita ketahui bahwa presiden Jokowi tidak mengambil cuti pada masa pencalonan atau masa pemilihan presiden untuk periode 2019-2024. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai pada pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum mentaati aturan yang sudah ditetapkan.

Masyarakat sendiri pada umumnya hanya bisa mengkritik apa yang dilakukan oleh pihak pemerintahan, karena kembali lagi ke paham demokrasi bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat, jadi masyarakat bebas untuk berpendapat mengenai sebuah pemerintahan, seperti halnya pendapat dari masyarakat yang berinisial AG yang berdomisili di kecamatan Seberang Ulu I :

“Menurut saya ada beberapa peraturan pemerintahan yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang mana pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, belakangan ini pemerintahan Jokowi tidak peduli dengan peraturan yang dibuat oleh DPR, contohnya seperti revisi UU MD3 yang salah satunya aturan tersebut bahwa DPR tidak boleh dikritik, menurut saya DPR sebelum membuat peraturan tersebut pastinya sudah berdiskusi terlebih dahulu kepada pemimpin negara”⁸

Menurut penjelasan AG tersebut ia menilai bahwa dalam pemerintahan presiden Joko Widodo kurang peduli dengan masyarakat secara luas, dilihat dari pendapat AG tersebut bahwa masyarakat ingin presiden Jokowi memprotes apa yang sudah dibuat pihak DPR yang dianggap merugikan masyarakat dengan membuat peraturan yang tidak

⁴⁸ Masyarakat inisial AG, domisili kecamatan Seberang Ulu I. Wawancara tgl 09 November 2019.

masuk di akal, jika masyarakat tidak boleh lagi mengkritik suatu pemerintahan artinya negara ini bukan menganut sistem demokrasi lagi, seperti yang kita ketahui bahwa paham demokrasi itu ialah bebas berpendapat.

Pada sistem pemerintahan dimana pemerintahan itu seharusnya menampung saran dan kritik dari pihak yang diperintah, karena di Indonesia sendiri menganut sistem demokrasi yang dimana rakyat lah sebagai penguasa dan pemerintah hanya sebagai pelayan terhadap rakyat. Rakyat hanyalah menginginkan pemerintahan yang baik dan yang mengerti terhadap keluhan rakyatnya. Adapun pendapat dari masyarakat yang berinisial HT yang berdomisili di kecamatan Sako Kota Palembang, ia berpendapat dimasa pemerintahan Jokowi masih terdapat yang melanggar aturan perundang-undangan, menurutnya :

“Menurut saya dimasa pemerintahan presiden Jokowi belum mentaati aturan yang sudah ditetapkan, karena lihat saja pada waktu itu pihak pemerintah mengimpor beras pada saat petani panen raya, seharusnya pada saat petani lokal panen pemerintah tidak boleh mengimpor beras”⁴⁹

Berdasarkan pendapat dari HT tersebut bahwa dimasa pemerintahan presiden Joko Widodo belum mentaati aturan yang sudah dibuat, pada masa petani lokal pihak pemerintahan justru mengimpor beras, dalam undang-undang pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan impor beras, yang isinya ialah beras hanya dapat diimpor diluar masa 1 bulan sebelum panen raya dan 2 bulan setelah panen raya. Artinya bahwa pemerintah

⁴⁹ Masyarakat inisial HT, domisili kecamatan Sako. Wawancara tgl 09 November 2019.

impur pada saat petani panen raya dapat dikatakan bahwa pemerintah menjatuhkan harga pasaran hasil panen petani lokal, karena kemana lagi petani akan menyalurkan hasil panennya jika pihak pemerintah sudah mengimpor beras dari luar negeri.

Jika peraturan yang sudah ditetapkan tidak dipatuhi oleh pihak pemerintah bagaimana sistem pemerintah negara ini bisa dikatakan baik, seharusnya pemerintah harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan agar masyarakat tidak merasa selalu dirugikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Seperti halnya kebakaran hutan dan lahan sudah berlangsung lama di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Kota Palembang sendiri merasakan dampaknya yang sehari-hari menghirup udara yang tidak sehat karena tebalnya kabut asap, sehingga aktivitas masyarakat sehari-hari terganggu. Seperti yang diungkapkan masyarakat yang berinisial NH yang berdomisili di kecamatan Plaju di Kota Palembang tersebut, bahwa menurutnya :

“Menurut saya dalam kebakaran hutan dan lahan tersebut menurut berita artikel yang saya baca, bahwa dalam permasalahan karhutla tersebut ada beberapa menteri yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tersebut karena kepentingan pribadi, dalam masalah ini juga Jokowi dinilai tidak melakukan penanganan yang baik dan lambat terhadap karhutla tersebut dan juga tidak mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat akan karhutla tersebut guna membuka sebuah lahan”¹⁰

⁵⁰ Masyarakat inisial HN, domisili kecamatan Plaju. Wawancara tgl 10 November 2019.

Dari pendapat NH tersebut bahwa penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dinilai lamban dan seolah-olah pemerintah membiarkan kebakaran hutan dan lahan tersebut, jika ingin di usut tuntas pihak mana saja yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan tersebut, karena yang mempunyai wewenang hanyalah pihak pemerintah. Tetapi tidak dipungkiri bahwa pihak pemerintah mungkin sudah bekerja semaksimal mungkin untuk membuat kebakaran hutan dan lahan tersebut tuntas, agar masyarakat tidak terkena dampak dari karhutla tersebut.

Dengan pendapat-pendapat dari masyarakat Kota Palembang tersebut bahwa dimasa pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum begitu baik di mata masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo masih banyak yang tidak mentaati sebuah aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut Beetham pemerintahan yang bisa dianggap sah apabila pemerintahan tersebut menjalankan dengan benar apa yang sudah menjadi aturan yang sebelumnya sudah ditetapkan.¹¹ Artinya dalam konteks ini masyarakat masih menganggap dalam kepemimpinan presiden Jokowi belumlah begitu baik dengan masih banyaknya pihak pemerintah yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

⁵¹ Beetham, *Op.Cit*, h.16

2. Aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah.

Di suatu negara tentunya pasti ada pihak yang memerintah (presiden) dan pihak yang diperintah (masyarakat), dalam hal itu pihak memerintah tidak bisa dipisahkan dari pihak yang diperintah, karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Maka dalam suatu negara jika suatu pemerintahan yang ingin membuat suatu kebijakan harus melalui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pemerintah bisa membuat suatu kebijakan untuk kepentingan bersama. Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.¹²

Kekuasaan harus diperoleh dari sumber otoritas yang sah, peraturan harus menetapkan bahwa mereka yang berkuasa memiliki kualitas yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang diperintah dan struktur kekuasaan harus dilihat untuk melayani kepentingan umum yang dapat diakui, dan bukan sekadar kepentingan pihak yang berkuasa. Artinya bahwa dari pihak pemerintah dan pihak yang diperintah ini harus mempunyai kesepakatan bersama dan harus mempunyai kepercayaan satu sama lain. Seperti halnya dalam menentukan sebuah kebijakan yang gunanya untuk kepentingan bersama, masyarakat harus diikutsertakan dalam pembuatan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

⁵² *Ibid*, h.17

Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo apakah masyarakat merasa di ikutsertakan dalam menentukan suatu kebijakan yang berguna untuk kepentingan bersama. Menurut pendapat dari masyarakat yang berinisial BN yang berdomisili dikecamatan Kemuning Kota Palembang, bahwa pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo belum melibatkan masyarakat dalam membuat kebijakan.

“Saya sebagai masyarakat belum merasa puas dengan kinerja presiden Jokowi dalam menjadi seorang pemimpin, karena menurut saya dalam kepemimpinan Jokowi ada yang saya tidak senang, contohnya dalam kemenangannya ini, baru saja dia dinyatakan menang BPJS akan dinaikan dan BBM akan dinaikan, menaikkan BBM tanpa sepengetahuan masyarakat”¹³

Kenaikan BBM dan BPJS memang sebenarnya untuk menstabilkan perekonomian diindonesia, tetapi dengan semua biaya kehidupan yang semakin mahal masyarakat akan semakin kesulitan dalam membiayai kehidupan sehari-hari, dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat merasa semakin dibohongi, pada kenaikan BBM yang tanpa sepengetahuan masyarakat tiba-tiba harga BBM dinaikan dilarut malam, seperti pendapat yang sama yang dikeluhkan oleh masyarakat yang berinisial BY yang berdomisili di kecamatan Gandus Kota Palembang :

“Saya merasa kurang senang dalam kepemimpinan Jokowi karena tiba-tiba BBM naik dilarut malam tanpa sepengetahuan masyarakat, menurut saya Jokowi juga tidak tegas dalam memimpin Negara, karena dia sering mengacuhkan keluhan masyarakat, dan tidak memahami urusan Negara, jadi menurut saya dia Cuma sekedar menjabat saja”¹⁴

⁵³ Masyarakat inisial BN, domisili kecamatan Kemuning. Wawancara tgl 12 Agustus 2019.

⁵⁴ Masyarakat inisial BY, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 15 Agustus 2019.

Menjadi seorang pemimpin memang tidaklah mudah untuk mengayomi semua apa yang diinginkan masyarakat, apalagi disebuah Negara yang besar dengan wilayah yang luas seperti Indonesia, tetapi menjadi seorang pemimpin Negara sudah menjadi kewajiban untuk menyayomi seluruh masyarakatnya, seharusnya seorang pemimpin mendengarkan keluhan masyarakatnya dengan meminta pendapat terlebih dahulu melalui wakil rakyat sebelum melakukan sesuatu yang akan berdampak ke masyarakat.

Masyarakat Kota Palembang masih banyak yang merasa tidak puas dalam terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai presiden, dikarenakan dalam kepemimpinan presiden Joko Widodo mereka sebagai masyarakat merasa semakin di miskinakan dari sisi ekonomi, dimasa pemerintahan presiden Joko Widodo perekonomian semakin menyulitkan masyarakat, adapun pendapat dari masyarakat berinisial YS yang berdomisili di kecamatan Sukarami Kota Palembang, ia berpendapat bahwa :

“Saya merasa kurang senang Jokowi terpilih kembali menjadi presiden karena semenjak Jokowi menjadi presiden ekonomi semakin tinggi, menurut saya di era kepemimpinan Jokowi perekonomian semakin buruk, saya sebagai pedagang sangat merasakan perekonomian sangat menyusahkan kami sebagai pedagang, lalu BPJS akan dinaikan juga, jadi saya merasa sangat susah di era kepemimpinan Jokowi”¹⁵

Berdasarkan pendapat YS tersebut bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Joko Widodo masih sangat membuat masyarakat kecil atau tidak mampu semakin terpuruk dengan melonjaknya harga

⁵⁵ Masyarakat inisial YS, domisili kecamatan Sukarami. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

bahan-bahan pokok membuat seorang pedagang merasa semakin disulitkan untuk menentukan harga dagangannya, karena menurut masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang seperti YS tersebut jika menjual dagangan dengan harga yang tidak seperti biasanya maka minat pembeli semakin berkurang.

Dengan perekonomian yang semakin melonjak maka tentu semakin tinggi angka kemiskinan dimasyarakat dan angka kriminal tentunya semakin meninggi dikarenakan kemiskinan yang melanda dan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia begitu banyak. Seperti halnya pendapat dari masyarakat yang berinisial AD yang berdomisili di kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang, berprofesi sebagai supir angkutan umum, menurutnya kebijakan-kebijakan yang dibuat presiden saat ini sangat bertentangan dengan profesinya, karena dengan kebijakan pembangunan LRT dan Trans Musi membuat para pekerja angkutan umum semakin kesusahan menacari penumpang dan semakin lama semakin berkurang pendapatan sehari-harinya :

“Kami sebagai supir angkutan umum menjadi lemah di era Jokowi, mencari uang semakin susah, rakyat banyak yang menganggur, pendapat kami sebagai supir angkutan umum jadi menurun semenjak banyaknya transportasi yang di bangun pemerintah, jadi kami menjadi semakin susah untuk mencari nafkah untuk keluarga, dengan banyaknya rakyat yang menganggur pun jadi makin banyak yang berbuat kejahatan / kriminal, jadi bagaimana rakyat mau mencari uang jika lapangan pekerjaan tidak disediakan, jika rakyat berbuat kriminal dihukum seberat-beratnya”¹⁶

⁵⁶ Masyarakat inisial AD, domisili kecamatan Bukit Kecil. Wawancara tgl 13 Agustus 2019.

Berdasarkan pernyataan diatas, dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo Masyarakat Kota Palembang masih banyak yang mengeluh dengan kurangnya lapangan pekerjaan, di zaman yang modern hidup serba mahal tentu masyarakat makin sulit untuk menafkahi keluarganya dengan lapangan pekerjaan yang tidak banyak, tentu semua masyarakat berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan, bagi yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Maka sebagian masyarakat yang sudah kehabisan akal untuk mencari uang akan terpengaruh ke sisi negatif dengan pengaruh lingkungan hidup mereka berbuat kejahatan agar mendapatkan uang.

Masyarakat Kota Palembang banyak yang mengeluh dengan terpilihnya kembali presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Karena dengan pernyataan presiden Joko Widodo secara terbuka kepada masyarakat luas bahwa ia sebagai pemimpin berencana memindahkan ibukota negara Indonesia ke tanah pulau Kalimantan. Tentu dengan pengungkapan rencana atau keputusan presiden Jokowi tersebut membuat banyak tanggapan masyarakat yang menilai bahwa presiden Jokowi tidak memikirkan dana yang akan dikeluarkan untuk memindahkan sebuah ibukota negara. Seperti halnya pendapat dari masyarakat yang berinisial HS yang berdomisili di kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang, menurutnya :

“Menurut saya dalam rencana Jokowi yang ingin memindahkan ibukota negara itu, seperti kesannya ia itu ingin membangun dan memajukan wilayah yang akan ditetapkan menjadi ibukota, menurut saya presiden Jokowi tidak ada program kerja yang lain apa selain infrastruktur, untuk memindahkan ibukota negara itu butuh biaya yang sangat

besar, mending dana tersebut digunakan mengalokasikan tingkat kemiskinan pada masyarakat”⁵⁷

Berdasarkan penjelesaian masyarakat yang berinisial HN bahwa dalam pemindahan ibukota tersebut membutuhkan biaya yang sangat banyak, dan dana itu pun dari mana lagi kalau tidak lain dari berhutang lagi, dengan dana pemindahan ibukota tersebut tentu hutang Indonesia semakin membengkak lagi, benar apa yang dikatakan HS tersebut bahwa dari pada memikirkan bagaimana mengenai pemindahan ibukota ditinjau Kalimantan, lebih baik pemerintah memikirkan kestabilan perekonomian masyarakat, dengan tingginya tingkat kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia tentu ini masalah yang sangat serius dibanding pemindahan ibukota yang membutuhkan dana yang sangat banyak.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah terkadang membuat masyarakat resah atas keputusan pemerintah yang bertujuan agar memecahkan permasalahan yang ada pada masyarakat, tetapi dalam hal menentukan suatu keputusan atau kebijakan pihak pemerintah yang dipimpin presiden Joko Widodo tidak melibatkan pendapat masyarakat.

Akibatnya masyarakat bukan semakin puas atas apa yang sudah pemerintah lakukan, tetapi justru masyarakat semakin resah atas apa yang dibuat oleh pemerintah, karena itu masyarakat Kota Palembang yang mayoritasnya pendukung Prabowo menilai dalam pemerintahan presiden

⁵⁷ Masyarakat inisial HS, domisili kecamatan Seberang Ulu II. Wawancara tgl 11 November 2019.

Jokowi tidak begitu baik, karena masih banyak masyarakat yang mengeluh kesulitan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pihak pemerintahan.

Menurut Beetham kekuasaan dapat dikatakan sah jika aturan kekuasaan dapat dibenarkan dalam hal kepercayaan yang dimiliki oleh pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.¹⁸ Menurut pemahaman Beetham tersebut artinya bahwa antara pemerintah dengan pihak yang diperintah itu seharusnya saling membenarkan dan saling mempercayai satu sama lain, jika pemerintah tidak mempercayai pendapat dari masyarakatnya dan masyarakat tidak percaya terhadap keputusan pemerintah, jika dilihat dari terori yang diungkapkan Beetham bahwa pemerintahan presiden Jokowi tidak mendapat legitimasi dari masyarakat.

3. Pihak diperintah menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai pemenang pada pilpres 2019 dan di sahkan presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024, pada kemenangan pasangan presiden Joko Widodo dan Ma'ruf ini tentu menuai pendapat masyarakat Kota Palembang yang mayoritas lebih mendukung lawan Jokowi yaitu Prabowo, dalam hal ini apakah masyarakat Kota Palembang yang mayoritas pendukung Prabowo bisa menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap kemenangan presiden Joko Widodo.

⁵⁸ Beetham, *Op.Cit.* h.17

Menurut Beetham persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan.¹⁹ Artinya bahwa agar pemerintahan mendapatkan legitimasi maka pihak yang diperintah yaitu masyarakat harus menunjukkan ekspresi persetujuan dengan terlibat langsung terhadap suatu kekuasaan seperti adanya pemilu dan adanya kompetisi partai dan adanya peraturan yang mengesahkan. Secara legalitas presiden Joko Widodo disahkan menjadi presiden, tetapi secara legitimasi presiden Joko Widodo belum tentu mendapat pengakuan atau kepercayaan dari masyarakat terhadap kemenangannya pada pilpres 2019.

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa di Kota Palembang sendiri mayoritas mendukung paslon No urut 2 yaitu pasangan Prabowo dan Sandiaga. Dalam hal ini apakah masyarakat Kota Palembang dapat menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019. Adapun ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial JH yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang :

“Saya secara pribadi dan dari hati nurani mengakui kemenangan Jokowi pada pilpres 2019, dan saya juga mengakui Jokowi menjadi presiden saat ini, pada awalnya saya memang menginginkan Prabowo yang menang, tapi nyatanya Jokowi yang menang, ya hukum saja mengesahkan ya kita sebagai masyarakat harus menerima, karena bila kita tidak mengakui Jokowi menjadi presiden berarti sama saja kita tidak punya

⁵⁹ Beetham, *Op.Cit.* h.18

presiden, sakit hati rasanya jika Negara ini di bilang tidak ada pemimpin”²⁰

Seperti yang dikatakan masyarakat yang berinisial JH tersebut kita sebagai masyarakat tidak mengakui adanya presiden, maka sama saja kita tidak mempunyai seorang pemimpin negara, karena salah satu konsep terbentuknya suatu Negara adanya pemerintahan dan seorang pemimpin, jika dalam suatu Negara tidak ada yang memimpin, maka tidak layak disebut dengan suatu Negara.

Dapat diartikan bahwa masyarakat yang berinisial JH tersebut menunjukkan ekspresi persetujuannya terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, tetapi memang awalnya ia adalah pendukung Prabowo dan menginginkan Prabowo yang menang, tetapi hukum sudah mengesahkan dan ia sebagai masyarakat harus menerima dan menyetujui apapun keputusan hukum. Seperti ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial RH yang berdomisili di kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yang pada awalnya ia menginginkan Prabowo yang menjadi presiden :

“Pada Awalnya saya memang pendukung Prabowo, tetapi yang menang Jokowi secara hukum, kita sebagai masyarakat harus mentaati hukum dan saya pribadi mengakui Jokowi sebagai presiden, karena saya menilai dari kinerja dia sebagai seorang pemimpin, semenjak dia menjadi presiden pembangunan di Indonesia ini semakin maju, seperti pembangunan jalan Tol antar Kota sudah banyak yang di bangun termasuk jalan Tol

⁶⁰ Masyarakat inisial JH, domisili kecamatan Ilir Timur I. Wawancara tgl 15 Agustus 2019.

*Palembang-Lampung dan pembangunan LRT juga sudah terlaksanakan di Kota Palembang*²¹

Adapun ekpresi persetujuan yang sama dari masyarakat yang berinisial DJ yang berdomisili di kecamatan Kalidoni Kota Palembang, bahwa ia menyetujui di karenakan hukum sudah mengesahkan kemenangan presiden Jokowi, KPU sudah mengumumkan presiden Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019 dan MK juga sudah menegaskan bahwa kemenangan presiden Jokowi tidak ada kecurangan, berikut pernyataannya :

*“Dari saya pribadi mengakui Jokowi saat ini menjadi presiden, karena mau tidak mau ya harus mengakui, hukum saja sudah mengesahkan, dari KPU yang telah mengumumkan bahwa Jokowi sebagai pemenang pilpres dan dari MK juga sudah menegaskan bahwa tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara dan MK juga sudah menetapkan Jokowi sebagai pemenang, jujur saya pertamanya menginginkan Prabowo sebagai presiden, tetapi ya sekarang kan Jokowi yang sudah ditetapkan sebagai pemenang. Dan masyarakat Indonesia juga masih menginginkan Jokowi menjadi presiden, jadi saya pribadi saat ini mengakui Jokowi menjadi presiden”*²²

Berdasarkan penjelasan masyarakat diatas bahwa menurutnya ia pribadi mengakui kemenangan presiden Joko Widodo Karena KPU dan MK sudah mempertegas bahwa kemenangan presiden Jokowi tidak terdapat bukti kecurangan, jika terdapat adanya kecurangan pasti pihak hukum tidak mengesahkan kemenangannya tersebut, tetapi dengan MK mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo membuat kepercayaan masyarakat bertambah kepada kemenangan presiden Jokowi tersebut

⁶¹ Masyarakat inisial RH, domisili kecamatan Ilir Barat I. Wawancara tgl 17 Agustus 2019.

⁶² Masyarakat inisial DJ, domisili kecamatan Kalidoni. Wawancara tgl 18 Agustus 2019.

memang sah. Adapun pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat yang awalnya pendukung Prabowo tetapi pada akhirnya ia menerima kemenangan presiden Jokowi, menurut penjelasan DW yang berdomisili di kecamatan Alang-alang lebar tersebut :

“Saya awalnya memang memilih Prabowo sebagai presiden, tetapi yang ditetapkan sebagai pemenang pilpres ialah Jokowi, saya sendiri menerima kemenangan Jokowi tersebut, karena saya juga menyukai sosok Jokowi, menurut saya kinerjanya yang bagus dan kepribadiannya juga yang baik dan santun, tetapi saya tidak memilihnya ia karena menurut saya di belakang ia atau orang-orang yang berpihak kepada ia mempunyai kepentingan masing-masing, itu yang saya tidak suka”⁶³

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh DW tersebut bahwa ia sangat menerima kemenangan presiden Joko Widodo karena ia menilai kinerja presiden Jokowi selama menjadi pemimpin cukuplah baik dan kepribadiannya juga sangat menjadi panutan karena kesopanannya yang sangat lemah lembut dalam berbicara. Menurutnya bahwa ia memilih dan lebih mendukung Prabowo karena di pihak presiden Jokowi terdapat orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi dengan mencalonkannya kembali presiden Joko Widodo pada pilpres 2019.

Adapun persetujuan masyarakat yang berinisial MF berdomisili di kecamatan Bukit Kecil Kota yang mengakui karena hukum sudah mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo:

⁶³ Masyarakat inisial DW, domisili kecamatan Alang-alang lebar. Wawancara tgl 11 November 2019.

“Kalau masalah mengakui atau tidak, ya saya mau tidak mau harus mengakui, karena hukum saja sudah mengesahkan Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019. Tetapi awalnya saya menginginkan Prabowo yang menjadi presiden. Saya tidak memilih Jokowi menjadi presiden karena menurut saya dia sebagai presiden tidak ada ketegasan dalam memimipin negara, karena Jokowi dari kalangan sipil bukan dari kalangan militer. Dari hasil yang sudah diumumkan dan sudah ditetapkn Jokowi sebagai pemenang pada pilres 2019, jadi saya mau tidak mau harus mengakui Jokowi sebagai presiden karena hukum sudah mengesahkan dia sebagai presiden terpilih saat ini”²⁴

Berdasarkan dari beberapa penjelasan masyarakat diatas bahwa mereka mau tidak mau harus menyetujui atau menerima apapun keputusan hukum, berdasarkan dari penejelasan mereka pada awalnya mendukung Prabowo dan menginginkan Prabowo sebagai presiden, tetapi nyatanya KPU mengumumkan Jokowi sebagai pemenang pilpres 2019. Sebagai masyarakat memang sudah sepantasnya kita mentaati aturan hukum yang sudah di sah kan.

Lalu adapun ekpresi persetujuan masyarakat yang berinisial SLM yang berdomisili di kecamatan Kertapati Kota Palembang :

“Saya sangat menyetujui dan mendukung Jokowi menjadi presiden kembali, karena dari dulu saya senang kepada PDIP, jadi saya pilih Jokowi yang berasal dari PDIP, tetapi secara pribadi saya menyenangi juga sosok prabowo yang mempunyai kegagahan sebagai calon pemimpin”²⁵

⁶⁴ Masyarakat inisial MF, domisili kecamatan Bukit Kecil. Wawancara tgl 07 Agustus 2019.

⁶⁵ Masyarakat inisial SLM, domisili kecamatan Kertapati. Wawancara tgl 09 Agustus 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas dari masyarakat yang berinisial SLM yang berdomisili di Kecamatan Kertapati Kota Palembang tersebut, menurutnya bahwa ia memilih Jokowi karena identik kepada salah satu partai yang disenanginya sejak dahulu. Dari pernyataan itu bahwa masih ada masyarakat yang memilih pemimpin dengan tradisi lama nya yang memilih pemimpin identik dengan sesuatu atau sekelompok yang sudah disenangi sejak lama. Tetapi ia juga tidak bisa menyembunyikan kesenangannya terhadap sosok Prabowo sebagai lawan Jokowi yang memiliki kegagahan sebagai calon pemimpin.

Lalu pengakuan lain dari masyarakat yang berinisial SD berdomisili di kecamatan Gandus Kota Palembang :

“Saya menyetujui Jokowi sebagai presiden, karena dia presiden terpilih saat ini, saya juga cukup puas terhadap bapak Jokowi sebagai presiden karena kinerjanya sebagai pemimpin yang cukup baik”²⁶

Berdasarkan pernyataan diatas sudah hal yang biasa terhadap pendapat masyarakat yang menyetujui seorang pemimpin dalam menduduki jabatan sebagai kepala negara yang dinilai dari kinerjanya dalam memimpin suatu negara. Pada era kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat tidak sedikit juga yang merasakan kesenangan dan kemudahan dalam bidang infrastruktur yang telah dibangun.

⁶⁶ Masyarakat inisial SD, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 10 Agustus 2019.

Pada kepemimpinan presiden Joko Widodo pembangunan semakin berkembang dan maju di seluruh Indonesia, khususnya Kota Palembang sendiri yang sudah banyak bukti yang dilakukan presiden Joko Widodo seperti persetujuan dari masyarakat yang berinisial SD tersebut yang merasa senang terhadap kinerja presiden Joko Widodo dalam membangun Negara. Seperti halnya ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial MTP yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang :

“Saya pribadi mengakui Jokowi menjadi presiden karena dari kinerjanya yang bagus, saya tidak pandai berpolitik ataupun mengkritik, tetapi saya sangat merasakan di kepemimpinan Jokowi saat ini, saya memandang dari infrastrukturnya Jokowi sangat sukses dalam membangun negara, karena selama Jokowi belum menjadi presiden tidak ada gubrahan yang seperti saat ini dilakukan Jokowi”⁶⁷

Berdasarkan pernyataan masyarakat dalam era kepemimpinan presiden Joko Widodo sukses dalam bidang pembangunan, masyarakat merasa puas dengan kinerja presiden Joko Widodo. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa ada masyarakat yang mengakui Jokowi karena kewibawaan presiden Joko Widodo sebagai seorang pemimpin.

Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dibidang pembangunan sangatlah maju begitu pesat, dengan pembangunan yang begitu maju membuat masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, khusus lagi masyarakat Kota Palembang yang beberapa merasa sangat puas dengan kinerja presiden Joko Widodo dibidang infrastruktur. Dengan karakter yang begitu lemah lembut yang

⁶⁷ Masyarakat inisial MTP, domisili kecamatan Ilir Timur I. Wawancara tgl 09 November 2019.

dimiliki presiden Joko Widodo membuat salah satu masyarakat berinisial ER yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur III menyukai sosok presiden Jokowi karena sifatnya yang lemah lembut :

“Saya mengakui Jokowi sebagai presiden, karena bagi saya bagus cara Jokowi memimpin negara, dia tidak memandang Suku, Agama, semua dia perlakukan sama, tidak pernah membedah - bedakan, cuma karena karakternya yang lemah lembut itu mungkin memang sudah menjadi sifat dia”²⁸

Berdasarkan ekspresi persetujuan ER tersebut bahwa seorang pemimpin bisa diakui atau di percayai itu dari kepribadian individu seorang pemimpin. Yang harus dilakukan seorang pemimpin ialah bagaimana caranya bisa membuat daya tarik kepada masyarakat, agar masyarakat menganggap seorang pemimpin tersebut sebagai seorang pahlawan.

Menjadi seorang pemimpin memang harus banyak melakukan apa yang diinginkan masyarakat agar menarik simpati masyarakat terhadap seorang pemimpin tersebut, kepribadian seorang pemimpin itu sangat menjadi acuan terhadap masyarakat, apabila kepribadian seorang pemimpin tidak begitu baik, maka dampaknya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

Seperti halnya presiden Joko Widodo yang sudah banyak menarik perhatian masyarakat secara luas, dari kepribadiannya yang sangat lemah lembut kepada masyarakat, dalam pengalamannya sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, sudah banyak yang presiden Joko Widodo

⁶⁸ Masyarakat inisial ER, domisili kecamatan Ilir Timur III. Wawancara tgl 16 Agustus 2019.

lakukan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap dirinya dengan cara merakyat seperti pada saat ada bencana alam dia turun langsung menemui masyarakat yang terkena bencana.

Pada saat presiden Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat Kota Jakarta dilanda banjir bapak Jokowi turun langsung kelokasi banjir dan berpartisipasi membantu pegawai dinas kebersihan membersihkan selokan, agar tidak terjadi banjir. Hal itulah beberapa strategi presiden Joko Widodo dalam menarik perhatian masyarakat untuk menyukai dirinya.

Pada sisi lain presiden Joko Widodo juga member bantuan ke masyarakat yang kurang mampu seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), berobat gratis, bantuan beras raskin, dengan bantuan itu masyarakat merasakan bantuan, seperti ekspresi persetujuan dari masyarakat yang berinisial EM yang berdomisili di kecamatan Gandus :

“Saya mengakui Jokowi menjadi presiden, karena sudah banyak yang Jokowi lakukan untuk membantu rakyat kecil seperti kami, saya ucapkan Alhamdulillah sekali semenjak Jokowi menjadi presiden kami merasa sangat terbantu, setiap tahun kami mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dari bapak Jokowi, kami tidak bisa berkata apa-apa lagi, cuma tuhan yang mengetahui”²⁹

Masyarakat menilai presiden Joko Widodo juga tegas dalam memberantas semua kasus, seperti memberantas pungli, memberantas narkoba yang merajalela, setelah kepemimpinan presiden Joko Widodo banyak gembong narkoba yang dihukum mati. Tetapi seperti yang kita

⁶⁹ Masyarakat inisial EM, domisili kecamatan Gandus. Wawancara tgl 08 Agustus 2019.

ketahui bahwa di Kota Palembang sendiri mayoritas pendukung Prabowo, maka dalam kemenangan presiden Jokowi tersebut beberapa masyarakat Kota Palembang masih tidak menerima keputusan yang sudah ditetapkan hukum.

Pada masa pemilihan presiden tentu masyarakat menginginkan suatu perubahan untuk kemajuan suatu negara. Banyak faktor yang membuat masyarakat menginginkan kepemimpinan yang baru dan tidak mengakui lagi kepemimpinan yang lama. Salah satu faktor yang membuat masyarakat menginginkan suatu perubahan seperti dari bidang perekonomian masyarakat menginginkan perubahan perekonomian dalam kehidupan mereka, seperti bahan pokok dan biaya kehidupan sehari-hari masyarakat ingin dipermudah, dan masyarakat juga menginginkan harga hasil perkebunan dinaikan.

Di masa kepemimpinan presiden Joko Widodo banyak masyarakat yang mengeluh terhadap hasil perkebunan yang dipatok harga murah karena pemerintah sering impor. Seperti ekspresi dari masyarakat berinisial WL yang berdomisili di kecamatan Kemuning Kota Palembang yang tidak menerima terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019, karena menurutnya :

“Dari hati nurani saya tidak menerima Jokowi menjadi presiden lagi, dikarenakan semenjak Jokowi menjadi presiden petani karet menjadi susah karena menurunnya harga karet dari kisaran Rp17.000 sampai turun menjadi Rp3.500 dan pada saat

*Jokowi diumumkan menang sebagai presiden pada pilpres 2019
BPJS akan dinaikan lagi biaya iurannya*³⁰

Dari penjelasan WL tersebut bahwa dimasa kepemimpinan presiden Joko Widodo masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan perkebunan semakin tidak diuntungkan, pasalnya bahwa dimasa kepemimpinan presiden Jokowi harga karet semakin tahun semakin merosot turun harga jualnya, menurut keterangannya sebelum presiden Jokowi menjadi pemimpin harga karet itu kisaran 17.000 dan terus naik, tetapi pada saat Joko Widodo yang menjadi presiden harga karet menjadi sangat murah sampai kisaran harga 3.500 saja.

Sedangkan menurut ekspresi tidak menrima dari masyarakat yang berinisial DI yang berdomisili di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang :

*“Dari hati nurani saya tidak ada pemikiran saya untuk memilih Jokowi menjadi presiden, saya tidak mengakui Jokowi presiden saat ini karena dalam kepemimpinannya tidak baik, lapangan pekerjaan semakin sulit dicari, pengangguran semakin banyak, itu salah satu sebab membuat masyarakat berbuat kriminal agar mendapatkan uang. Dan saya sebagai supir angkutan umum semakin susah mendapatkan uang karena banyaknya persaingan tranfortasi yang dilahirkan oleh pemerintah”*³¹

Berdasarkan pernyataan masyarakat tersebut bahwa lapangan kerja yang semakin sempit membuat masyarakat berlomba-lomba dalam mendapatkan pekerjaan. Sebagai pemerintah sudah seharusnya pimpinan negara menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak untuk warga negara Indonesia. Kriminal dan pengedaran narkoba semakin merajalela karena

⁷⁰ Masyarakat inisial WL, domisili kecamatan Kemuning. Wawancara tgl 08 Agustus 2019.

⁷¹ Masyarakat inisial DI, domisili kecamatan Ilir Barat II. Wawancara tgl 09 Agustus 2019.

salah satu faktor ialah banyaknya pengangguran. Sulitnya mencari pekerjaan membuat masyarakat kehabisan akal pikiran agar mendapatkan uang dengan cara apapun untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Dengan perekonomian yang semakin tinggi maka masyarakat mau tidak mau harus mendapatkan uang agar dapat bertahan hidup.

Adapun ekspresi tidak menyetujui dari masyarakat yang berinisial SY yang berdomisili di kecamatan Alang-Alang Lebar, bahwa dia tidak menerima presiden Joko Widodo terpilih kembali menjadi presiden, karena yang dirasakannya di era kepemimpinan presiden Joko Widodo perekonomian semakin memburuk.

“Kalau dari pribadi saya tidak menerima Jokowi terpilih kembali menjadi presiden, karena dalam kepemimpinannya perekonomian semakin memburuk. Saya sebagai pedagang sangat merasakan. Harga bahan pokok semua naik, BPJS pun akan naik lagi, kita sebagai masyarakat semakin dibuat susah, seperti orang tua saya yang didesa yang bertani karet, harga karet sekarang semakin merosot”⁷²

Pada dasarnya masyarakat merasa kecewa terhadap perekonomian yang semakin hari menyulitkan masyarakat menengah kebawah, kebutuhan sehari-hari berupa bahan pokok pada saat kepemimpinan presiden Joko Widodo dinaikkan dan juga BBM dinaikkan, hal inilah yang membuat masyarakat mengeluh menginginkan pemimpin yang baru agar adanya perubahan suatu perekonomian untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti pendapat dari masyarakat yang berinisial BI yang berdomisili di kecamatan Sako Kota Palembang :

⁷² Masyarakat inisial SY, domisili kecamatan Alang-alang lebar. Wawancara tgl 12 Agustus 2019.

“Menurut pribadi saya tidak menerima atau tidak mengakui Jokowi terpilih kembali sebagai presiden. Pada periode pertama saya pendukung Jokowi karena kepemimpinannya yang bagus dalam memimpin provinsi DKI Jakarta. Tetapi pada saat ini saya menginginkan perubahan ganti presiden, alasannya karena dari faktor ekonomi yang buruk dimasa kepemimpinan Jokowi, bahan-bahan pokok semua naik, ya yang baru-baru ini BPJS dan BBM akan dinaikkan lagi”⁷³

Berdasarkan aturan asas pemilu di Indonesia bahwa pelaksanaan pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat dan prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang legitimate.

Pada pemilu 2019 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden yang mempertemukan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan lawannya yaitu pasangan Prabowo subianto dan Sandiaga Salahudin Uno, banyak masyarakat yang berpikir bahwa pelaksanaan pilpres tidak berjalan dengan adil. Karena menurut beberapa pendapat masyarakat Kota Palembang paslon Joko Widodo dan Ma'ruf Amin diduga melakukan kecurangan pada pilpres 2019. Seperti Pengungkapan dari masyarakat yang berinisial RD yang berdomisili di kecamatan Ilir Timur II yang tidak mengakui presiden Joko Widodo sebagai presiden saat ini, menurutnya :

⁷³ Masyarakat inisial BI, domisili kecamatan Sako. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

“Saya tidak mengakui Jokowi menjadi presiden saat ini, karena dalam kemenangan Jokowi itu dalam pilpres 2019 diduga adanya kecurangan, buktinya di daerah sekayu yang surat suara sudah dicoblos terlebih dahulu kepada pasangan calon capres dan cawapres No urut 1”⁷⁴

Pada pilpres tahun 2019 beredar banyak berita yang menayangkan mengenai surat suara yang sudah tercoblos pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin, dengan beredarnya berita tersebut tentu membuat masyarakat yang kontra terhadap pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin semakin menduga bahwa paslon No urut 1 tersebut berbuat kecurangan. Tetapi kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak semudah itu saja percaya terhadap berita yang beredar, bisa saja berita tersebut hanyalah Hoax, nyatanya KPU meresmikan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 dan diperkuat dengan keputusan MK yang mengesahkan kemenangan tersebut.

Tetapi masyarakat masih tidak menerima dengan keputusan KPU dan MK tersebut, seperti pernyataan dari masyarakat yang berinisial ADT yang berdomisili di kecamatan Kertapati, menurutnya bahwa :

“Saya pribadi menginginkan Prabowo yang menjadi presiden, karena menurut saya semangat Prabowo yang begitu tinggi untuk merubah wajah Indonesia terhadap negara-negara asing, karena sekarang ini menurut saya Indonesia terlalu dianggap sebelah mata oleh negara asing. Tetapi nyatanya Jokowi yang menjadi presiden, saya pribadi tidak menerima Jokowi yang menang, karena menurut saya sudah cukup puas dengan kinerja Jokowi selama ini dengan menebar janji saja”⁷⁵

⁷⁴ Masyarakat inisial RD, domisili kecamatan Ilir Timur II. Wawancara tgl 14 Agustus 2019.

⁷⁵ Masyarakat inisial ADT, domisili kecamatan Kertapati. Wawancara tgl 09 November 2019.

Berbagai alasan yang sudah dilontarkan masyarakat Kota Palembang mengenai pengakuan masyarakat terhadap presiden Joko Widodo, mulai dari kinerja presiden Jokowi sampai cara kepemimpinan presiden Jokowi yang menjadi alasan masyarakat Kota Palembang memilih dan mengakui presiden Joko Widodo menjadi presiden saat ini.

Persetujuan masyarakat terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 memang banyak alasan yang masyarakat lontarkan, seperti pernyataan - pernyataan diatas bahwa masyarakat mengakui kemenangan presiden Joko Widodo dikarenakan hukum yang sudah mengesahkan dan sebagian masyarakat memang yang cukup puas dengan kinerja presiden Joko Widodo, di Kota Palembang sendiri dengan Mayoritas dengan pendukung Prabowo dan nyatanya di Kota Palembang sendiri dimenangkan oleh suara Prabowo.

Tetapi dengan hukum yang telah mengesahkan kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 maka sebagian masyarakat yang dahulunya pro terhadap Prabowo tetapi sekarang bisa menunjukkan ekspresi persetujuannya terhadap kemenangan presiden Joko Widodo pada pilpres 2019 karena aturan hukum telah mengesahkannya.

Seperti yang dikemukakan Beetham bahwa ekspresi persetujuan yang dapat dibuktikan pada pihak yang diperintah terhadap hubungan kekuasaan tertentu di mana mereka terlibat, melalui tindakan yang memberikan bukti persetujuan. Dan jika ekspresi persetujuan publik memberi kontribusi pada legitimasi yang berkuasa, maka penarikan atau

penolakan atas persetujuan akan dengan cara yang sama mengurangi darinya.³⁶ Artinya bahwa jika pihak yang diperintah mengungkapkan ekspresi persetujuannya, maka dapat dikatakan bahwa suatu kepemimpinan tersebut dinyatakan legitimate.

Berdasarkan teori legitimasi yang dikemukakan David Beetham dalam bukunya *The Legitimation Of Power*³⁷, bahwa menurutnya terdapat 3 bagian untuk melahirkan suatu legitimasi, yaitu *Pertama*, Kekuasaan harus dijalankan berdasarkan dengan aturan yang sudah dibuat. *Kedua*, aturan harus dibenarkan dari keyakinan bersama antara pemerintah dan yang diperintah. *Ketiga*, Pihak yang diperintah harus menunjukkan ekspresi persetujuan terhadap yang berkuasa. Artinya untuk melahirkan suatu legitimasi dari masyarakat pemerintah harus memelihara 3 bagian tersebut agar suatu pemerintahan dapat dikatakan legitimate karena adanya pengakuan dari pihak yang diperintah.

⁷⁶ Beetham, *Op.Cit.* h.19

⁷⁷ *Ibid*, h.20